

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

5.1.1. Implementasi Aplikasi SIPELAWAN dalam Menunjang Tugas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya strategis dalam menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Aplikasi ini lahir dari kebutuhan mendesak akan digitalisasi pelayanan kedewanan yang mendukung prinsip-prinsip *good governance*, termasuk keterbukaan informasi, partisipasi publik, dan penguatan fungsi administrasi legislatif. Secara substansial, SIPELAWAN bertujuan untuk menyederhanakan alur birokrasi internal, mendokumentasikan aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas melalui sistem yang terintegrasi dan mudah diakses.

Dari sisi regulasi, implementasi aplikasi ini memiliki pijakan hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan legitimasi normatif. Sementara regulasi daerah, termasuk Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2021 dan Keputusan Sekretaris DPRD Nomor 10 Tahun 2020, memberikan pedoman teknis bagi aparatur dalam mengoperasikan aplikasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa

internalisasi regulasi masih perlu ditingkatkan, karena sebagian staf teknis lebih fokus pada aspek operasional dan belum sepenuhnya memahami dasar hukum yang melandasi aplikasi. Hal ini menegaskan pentingnya sosialisasi regulasi dan penguatan pemahaman birokrasi agar aplikasi tidak hanya digunakan sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang sah secara hukum.

Implementasi SIPELAWAN membawa perubahan signifikan pada pola kerja aparatur. Proses yang sebelumnya manual dan rentan keterlambatan kini bertransformasi menjadi mekanisme digital yang lebih cepat dan terdokumentasi. Aspirasi masyarakat dapat diteruskan dan dipantau secara daring, administrasi perjalanan dinas menjadi lebih efisien, dan penggunaan kertas berkurang secara drastis. Fitur-fitur seperti E-Aspirasi, E-Wadul Dewan, E-Legislati, E-SPT, E-Pengawasan, dan JDIH memungkinkan layanan publik lebih responsif dan transparan. Kendati demikian, hambatan teknis seperti keterbatasan jaringan, downtime server, dan antarmuka pengguna yang belum sepenuhnya intuitif, serta resistensi budaya terhadap perubahan kerja digital, masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Peran implementor, baik pejabat struktural, staf teknis/operator, tim bidang pelayanan informasi, maupun masyarakat sebagai pengguna akhir, terbukti menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi. Pejabat struktural berperan dalam koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kebijakan, sedangkan staf teknis bertanggung jawab pada operasional harian, mulai dari verifikasi data, penginputan aspirasi, hingga penyelesaian aduan. Kompetensi teknis para implementor memegang peranan sentral; pelatihan, pengalaman, dan kemampuan adaptasi

terhadap teknologi digital menentukan efektivitas operasional aplikasi. Hasil triangulasi sumber, teknik, dan waktu menunjukkan bahwa sinergi antaraktor berjalan konsisten, meskipun disparitas kemampuan antarpegawai dan keterbatasan infrastruktur masih menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Secara keseluruhan, implementasi Aplikasi SIPELAWAN menunjukkan keberhasilan dalam membawa modernisasi pelayanan kedewanan melalui digitalisasi, dengan dampak positif pada efisiensi birokrasi, transparansi, dan partisipasi publik. Namun, efektivitas aplikasi tetap dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kapasitas teknis implementor, literasi digital masyarakat, dan keberlanjutan integrasi sistem. Dengan demikian, keberhasilan SIPELAWAN bukan hanya ditentukan oleh kekuatan substansi kebijakan dan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur dan pengguna untuk mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai instrumen pelayanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.

5.1.2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Aplikasi SIPELAWAN

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat. Analisis terhadap pengalaman implementasi menunjukkan bahwa keberhasilan aplikasi tidak semata-mata ditentukan oleh fitur teknis, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara regulasi, sumber daya, struktur organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi politik, sosial, dan ekonomi.

Faktor pendukung utama yang mendorong efektivitas SIPELAWAN terlihat dari adanya standar dan tujuan kebijakan yang jelas, yang dirumuskan secara formal dalam dokumen regulatif mulai dari UU tentang Keterbukaan Informasi Publik hingga peraturan daerah dan pedoman internal. Kejelasan ini memberikan arahan bagi aparatur dalam menjalankan aplikasi, sekaligus menegaskan legitimasi administratif dan kewenangan penggunaan aplikasi sebagai instrumen resmi pelayanan publik. Dukungan ini diperkuat oleh struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas rinci antarlevel birokrasi, keberadaan tim teknis dan PPID Pelaksana, serta SOP dan maklumat pelayanan yang menjadi pedoman operasional.

Dari sisi sumber daya, keberadaan pegawai muda yang adaptif terhadap teknologi digital, tim teknis yang terlatih, serta fitur digital yang fungsional seperti E-Aspirasi, E-Wadul Dewan, dan E-SPT menjadi faktor pendukung signifikan. Sumber daya manusia dan teknologi ini memungkinkan percepatan alur pelayanan, efisiensi administrasi, serta pemantauan aduan masyarakat secara lebih efektif. Komunikasi dan koordinasi internal yang berjalan melalui rapat rutin, disposisi elektronik, dan forum teknis antarunit, serta dukungan pimpinan yang menekankan transparansi dan digitalisasi, turut memperkuat disposisi positif pelaksana untuk mengadopsi dan memanfaatkan aplikasi.

Selain itu, kondisi politik yang mendukung berupa legitimasi hukum dan arahan strategis pimpinan, dukungan sosial berupa kesadaran staf tentang pentingnya partisipasi publik, dan ketersediaan anggaran yang memadai untuk operasional dan pelatihan teknis menjadi faktor penting yang memperkuat

implementasi. Sinergi antara faktor-faktor ini membentuk kerangka yang memungkinkan SIPELAWAN dijalankan secara konsisten, responsif, dan berorientasi pada peningkatan transparansi serta akuntabilitas pelayanan kedewanan.

Di sisi lain, sejumlah faktor penghambat masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi. Pertama, terdapat gap antara standar kebijakan dan praktik di lapangan, di mana SOP yang masih bersifat umum dan kurang teknis menimbulkan improvisasi oleh operator serta ketidakselarasan interpretasi antara pejabat struktural dan staf teknis. Kedua, keterbatasan sumber daya berupa infrastruktur teknologi yang belum merata, koneksi internet tidak stabil, server yang kadang mengalami downtime, serta alokasi anggaran yang terbatas, menyebabkan penanganan masalah lebih bersifat reaktif. Disparitas kompetensi antarpegawai, terutama antara generasi muda dan pegawai senior, juga menghambat optimalisasi pemanfaatan aplikasi.

Ketiga, kendala komunikasi dan koordinasi lintas OPD dan antarunit internal masih terlihat, baik akibat silo birokrasi, ego sektoral, maupun perbedaan budaya komunikasi yang mengutamakan tatap muka daripada mekanisme digital. Sosialisasi aplikasi ke publik yang masih terbatas juga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat belum optimal, sehingga pencapaian tujuan partisipasi publik dan akuntabilitas layanan belum sepenuhnya terealisasi.

Keempat, karakter organisasi dan disposisi pelaksana menjadi faktor penghambat tambahan. Resistensi budaya terhadap digitalisasi, beban kerja tinggi, dan ketidakpastian teknis memunculkan kehati-hatian atau preferensi terhadap

mekanisme manual. Perbedaan orientasi antarlevel birokrasi menimbulkan miskomunikasi, sedangkan SOP yang normatif kadang sulit diterapkan secara konsisten di lapangan.

Secara keseluruhan, implementasi SIPELAWAN menunjukkan keseimbangan dinamis antara faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung seperti legitimasi formal, struktur organisasi yang jelas, dukungan pimpinan, kompetensi SDM, dan keberadaan teknologi digital mampu memperkuat efektivitas aplikasi. Namun, hambatan berupa keterbatasan infrastruktur, gap antara SOP dan praktik, koordinasi lintas unit yang belum optimal, serta resistensi budaya dan disparitas kompetensi menjadi tantangan nyata. Keberhasilan implementasi ke depan menuntut strategi adaptif, termasuk penguatan kapasitas SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, penyempurnaan regulasi teknis, perluasan sosialisasi publik, serta pembangunan mekanisme koordinasi lintas OPD yang lebih sistematis. Dengan demikian, pencapaian tujuan digitalisasi layanan kedewanan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik hanya dapat diwujudkan melalui sinergi yang berkelanjutan antara faktor struktural, sumber daya, disposisi pelaksana, dan konteks politik-sosial-ekonomi.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kedewanan (SIPELAWAN) di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa strategi yang dapat dijadikan acuan untuk memperkuat efektivitas dan keberlanjutan aplikasi. Saran-saran ini dirumuskan dengan mempertimbangkan

aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi, koordinasi organisasi, serta konteks politik, sosial, dan ekonomi.

5.2.1. Penguatan Regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Meskipun tujuan dan standar kebijakan SIPELAWAN telah ditetapkan secara formal, praktik di lapangan menunjukkan adanya gap antara standar kebijakan dan implementasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan SOP dan pedoman teknis yang lebih rinci dan aplikatif, mencakup prosedur integrasi data lintas OPD, penanganan kasus sensitif, serta mekanisme saat terjadi gangguan sistem. Selain itu, sosialisasi internal yang lebih intensif diperlukan agar seluruh staf memahami tujuan, fungsi, dan prosedur aplikasi, sehingga interpretasi pelaksana menjadi seragam dan konsisten.

5.2.2. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor krusial dalam memaksimalkan potensi aplikasi. Upaya peningkatan kapasitas harus mencakup pelatihan teknis berkala, mentoring bagi pegawai senior agar adaptif terhadap sistem digital, serta pembinaan kompetensi operator muda untuk memaksimalkan fitur-fitur aplikasi. Penekanan pada pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan literasi digital internal akan meningkatkan disposisi positif pelaksana, menurunkan resistensi budaya, dan mempercepat adaptasi terhadap inovasi digital.

5.2.3. Peningkatan Infrastruktur Teknologi dan Dukungan Anggaran

Hambatan infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil, server downtime, dan keterbatasan perangkat keras menghambat kelancaran operasional SIPELAWAN. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi menjadi

prioritas, termasuk peningkatan kapasitas server, stabilisasi jaringan, dan penyediaan perangkat keras yang memadai untuk seluruh unit. Selain itu, alokasi anggaran yang cukup untuk pemeliharaan rutin, peningkatan fitur, serta inovasi digital harus dijamin agar aplikasi dapat berfungsi secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna.

5.2.4. Penguatan Koordinasi dan Komunikasi Antarunit dan OPD

Koordinasi lintas unit internal serta integrasi dengan OPD terkait perlu ditingkatkan melalui mekanisme yang lebih sistematis. Forum koordinasi reguler, standardisasi pertukaran data, serta protokol komunikasi digital dapat memperkecil hambatan silo birokrasi dan ego sektoral. Selain itu, penguatan komunikasi publik melalui sosialisasi yang lebih luas, pemanfaatan media sosial, dan kampanye literasi masyarakat akan meningkatkan partisipasi publik, pemahaman terhadap aplikasi, dan transparansi layanan.

5.2.5. Adaptasi Budaya Organisasi dan Perubahan Disposisi Pelaksana

Resistensi budaya terhadap mekanisme digital menjadi salah satu penghambat signifikan. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi perlu didorong melalui pendekatan transformasional, misalnya pemberian insentif bagi pelaksana yang proaktif menggunakan aplikasi, pengakuan terhadap inovasi internal, dan pembiasaan penggunaan digital dalam alur kerja harian. Pendekatan ini akan membantu menggeser disposisi dari kehati-hatian atau skeptisisme menjadi adopsi aktif dan partisipasi yang konsisten.

5.2.6. Pemantauan, Evaluasi, dan Penyempurnaan Berkelanjutan

Implementasi aplikasi digital tidak bersifat statis. Diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang menilai kinerja aplikasi, kepuasan pengguna, dan kesesuaian implementasi dengan standar kebijakan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan teknis, penyempurnaan SOP, dan perencanaan strategi pengembangan aplikasi di masa depan.

5.2.7. Sinergi Politik, Sosial, dan Ekonomi

Dukungan politik melalui arahan pimpinan dan legitimasi regulasi harus terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan implementasi. Selain itu, adaptasi terhadap konteks sosial, termasuk literasi masyarakat terhadap layanan digital, serta pengelolaan anggaran secara tepat, menjadi kunci untuk memastikan SIPELAWAN mampu dijalankan secara efektif dan responsif. Sinergi antara faktor politik, sosial, dan ekonomi ini akan memastikan pencapaian tujuan digitalisasi pelayanan kedewanan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik secara berkelanjutan.